



PROSIDING

“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
DALAM INTEGRASI ASEAN COMMUNITY 2015”



Pelaksanaan Venas kali ini memiliki arti penting dalam melanjutkan dan memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan antara jurusan dan dosen Ilmu Hubungan Internasional dari berbagai universitas di Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan modal yang sangat baik untuk memberikan banyak kontribusi dalam pengembangan keilmuan hubungan internasional maupun juga kontribusi kepada negara dan juga masyarakat Indonesia.

Dari Venas kali ini muncul berbagai macam ide dan gagasan baik yang tertuang dalam beberapa artikel dalam prosiding ini, maupun dalam berbagai diskusi yang muncul dalam presentasi maupun dalam sidang komisi dan pleno yang membahas tentang kelembagaan asosiasi ini.

Tema tentang Komunitas ASEAN merupakan satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan, dipandang dari dua sisi. Pertama, secara keilmuan, fenomena ASEAN Community ini merupakan ladang penelitian yang sangat menarik dan memberikan “undangan” kepada peminat, pegiat dan penstudi ilmu hubungan internasional untuk meneliti dan mengamatinnya. Kedua, secara praktis, waktu menjelang pelaksanaan ASEAN Community ini menjadi semakin dekat. Tentu, dibutuhkan persiapan yang matang agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu dari hasil Venas ini diharapkan akan muncul berbagai gagasan dan ide tentang bagaimana posisi Indonesia dalam perubahan regional Asia Tenggara ini.



Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
dan Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang



ISBN



9 786029 167184 1

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

*“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
DALAM INTEGRASI ASEAN COMMUNITY 2015”*



KONVENSI NASIONAL III
ASOSIASI HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

MALANG, 8-10 OKTOBER 2012



Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
dan
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang



Prosiding

SEMINAR NASIONAL

***“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL DALAM INTEGRASI ASEAN
COMMUNITY 2015”***

**KONVENSI NASIONAL III
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INDONESIA**

MALANG, 8 – 10 OKTOBER 2012



**Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
dan
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
DALAM INTEGRASI ASEAN COMMUNITY 2015”**

© Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2013
viii + hlm.; 21x29.7cm
ISBN:

Editor: Tonny Dian Effendy
Perancang Sampul:
Penata Letak:

Pertama kali diterbitkan oleh
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Bekerja sama dengan
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Dicetak Oleh:
Mata Padi Pressindo
08179407446, 081227837806
tribima@yahoo.com, matapadi_media@yahoo.com

DAFTAR ISI

Kata pengantar	
Daftar Isi	

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

- Keamanan Pangan Regional Tanpa Kedaulatan Pangan Lokal : Kasus Pertanian Indonesia dalam Konteks Pangan ASEAN
Andre Ardi
- Komunitas Epistemik dan Peran *Second Track Diplomacy* dalam Kerjasama Ekonomi Asia Timur
Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono
- Pendefinisian *ASEAN Community* di Era Globalisasi
Mohammad Riza Widyarsa
- Indonesia : Strengthening the Competitiveness of Domestic Products and Protecting Domestic Labour Force from any Detrimental Effects of the ASEAN-China Free Trade Agreement
Hevi Kurnia Hardini
- Identitas Kerjasama Regional Asia Tenggara : Sulitnya Mewujudkan ASEAN Free Trade Area (AFTA)
Obsatar Sinaga

KEAMANAN

- Keterlibatan Akademik Intelektual dalam Modus Pemerintahan Neoliberal: Kasus Integrasi Keamanan ASEAN
Hizkia Yosie Polimpung
- Kegagalan *Code of Conduct* (CoC) dan Tantangan Bagi ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan
Purnama Wulandari
- Peran Indonesia Melalui *Regional Peace Making* dalam Pencapaian *ASEAN Community*
Arin Fithriana
- Problem *State-led Regionalism* dalam Transformasi ASEAN
Ade M Wirasenjaya
- Memahami *ASEAN Community* dengan Teori-teori Integrasi Internasional : Fungsionalisme, Neofungsionalisme dan Konstruktivisme
Bambang Wahyu Nugroho
- Komunitas ASEAN 2015: *Survival, Peacefull Coexistence, Global Concern* dan *Global Interest*
Andrik Purwasito

- Kerjasama ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme
Sukawarsini Djelantik
- *Quo Vadis* Konflik Laut China Selatan
Yudha Kurniawan
- South China Rising Tension: The Quest of ASEAN's Role?
Angel Damayanti

SOSIAL-BUDAYA

- Kepemerintahan Lingkungan di Asia Tenggara
Apriwan
- The Establishment of The Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)
and The Internationalization of Asean Political Culture
M. Sigit Andhi Rahman
- Indonesia Menuju ASEAN Community 2015
Emil Radhiansyah
- Pembentukan Piagam ASEAN : Tinjauan Konstruktivisme Politik Hukum Internasional
Deni Meutia dan Yoga Suharman
- ASEAN Community 2015 from Socio-Cultural Perspective
Amb. Nazaruddin Nasution

Daftar Penulis

I
EKONOMI POLITIK
INTERNASIONAL

KEAMANAN PANGAN REGIONAL TANPA KEDAULATAN PANGAN LOKAL: KASUS PERTANIAN INDONESIA DALAM KONTEKS PANGAN ASEAN

Andre Ardi

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo (B)

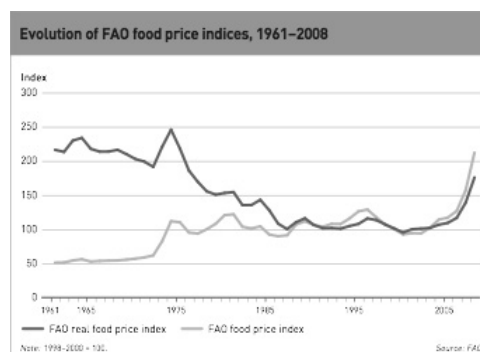
Abstraction

One of the efforts to prevent the impact of the world food crisis is by strengthening the mechanism of the regional food security. There for since 2009 ASEAN has been implemented the ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Frame Work and the Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS). The goal of the program is to ensure long-term food security and to improve the livelihoods of farmers in the ASEAN region. Become a question then how we can reach the regional food security without local food sovereignty? Looking at the Indonesian Case that has a huge potential in agroculture but become more and more depend on foods import. This papper tries to describe that regional food security will be hard to gain without food sovereignty at the local level by examine Indonesian case in the ASEAN context.

Keywords: Agriculture, Food Security, Food Sovereignty

Ketidakamanan Pangan Global

Dalam sejarah pangan dunia, tahun 2007/2008 merupakan salah satu periode krisis yang ditandai dengan naiknya harga pangan global. Pada tahun tersebut, 180 negara bertemu di Roma untuk menyepakati komitmen tindakan bersama yang terkoordinasi untuk memerangi dampak buruk dari kenaikan harga pangan tersebut. Di titik ini negara-negara di dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa kenaikan harga pangan dunia telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan pangan (*food security*) secara global. Komitmen-komitmen sejenis juga muncul pada berbagai pertemuan multilateral dan regional.



Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2008 di atas menunjukkan bahwa kenaikan yang sangat signifikan dari harga pangan dunia. Index kenaikan tersebut bahkan telah mendekati harga ketika terjadi krisis pangan pada tahun 1970an. Sebagai catatan bahwa Krisis pangan tahun 1970-an ini adalah yang terburuk terjadi pada masa Pasca Perang Dunia II.

Sebelumnya, sejak berakhirnya perang, persoalan pangan memang menjadi hal yang sangat serius diperhatikan oleh negara-negara maju dan berkembang. Marshall Plan Amerika Serikat misalnya menjadikan bantuan pangan dan pertanian sebagai salah satu paket bantuan utama untuk membantu negara-negara Eropa pasca perang. Kebijakan pangan dari negara-negara waktu itu hampir semuanya menitikberatkan kepada peningkatan produksi pertanian untuk menghindar

dari ancaman kelaparan dan inflasi. Untuk itu mereka berusaha menekan laju impor pangan dalam rangka melindungi dan memperbaiki posisi ekonomi para petani. Kebijakan pertanian ini meliputi kebijakan proteksi, harga, dan perlindungan terhadap pendapatan petani yang kesemuanya berujung pada kebijakan subsidi ekspor. Seluruh kebijakan tersebut, ditambah dengan keberhasilan Revolusi Hijau, kemudian menyebabkan terjadinya surplus produksi pertanian yang sebaliknya justru menyebabkan turunnya harga produk-produk pertanian. Dalam kurun dua dekade hingga awal tahun 1970, meskipun fluktuatif, namun produksi pertanian dunia naik hingga lebih dari 50%.

Kenaikan produksi dan jatuhnya harga pangan menyebabkan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Kanada, kemudian melakukan kebijakan pengaturan pasokan guna menurunkan surplus produksi mereka. Faktor-faktor lain kemudian berkelindan turut menyebabkan turunnya produksi pangan dunia dan sebaliknya meroketkan harga. Di antara faktor-faktor tersebut adalah persoalan iklim yang tidak kondusif dan gagal panen gandum di Uni Soviet yang memaksa mereka untuk melakukan transaksi impor gandum, di antaranya dari Amerika Serikat, terbesar sepanjang sejarah. Faktor lain yang kemudian turut memperburuk keadaan adalah kenaikan harga minyak yang menimbulkan efek kenaikan harga pupuk (Shaw, 2007, pp. 115-116).

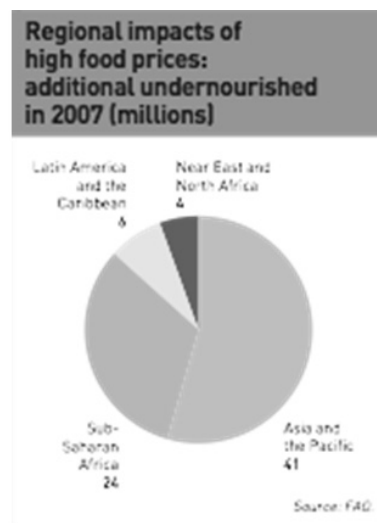
Kondisi tersebut memaksa negara-negara melakukan koordinasi di Roma pada tahun 1974. Hasilnya adalah proposal tindakan yang berisi: (1) kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan; (2) kebijakan untuk memastikan ketersediaan pangan di negara-negara berkembang; (3) kebijakan Keamanan Pangan yang meliputi Sistem Peringatan Dini dan Sistem Informasi, Sistem stok pangan internasional, dan bantuan pangan; (4) kebijakan perdagangan pangan; dan (5) implementasi. Inti dari kebijakan ini sebenarnya bermuara pada dua hal yaitu: keamanan pangan dan produksi pangan (Shaw, 2007, p. 127). Hasil dari koordinasi pangan dunia itu menciptakan trend harga pangan dunia yang terus menurun selama tiga dasawarsa.

Itulah sebabnya ketika harga pangan dunia melonjak drastis pada tahun 2007, dunia harus kembali mengevaluasi apa yang terjadi dan apa yang berbeda pada krisis kali ini. FAO menyimpulkan bahwa kenaikan harga kali ini disebabkan oleh beberapa faktor pada sisi pasokan dan permintaan. Pada sisi pasokan penyebabnya adalah: (1) adanya perubahan kebijakan pertanian di Cina, Uni Eropa, India, dan AS yang menyebabkan penurunan pada stok dunia; (2) penurunan produksi pangan akibat perubahan iklim; dan (3) kenaikan harga minyak dunia yang memicu kenaikan biaya produksi. Sedangkan pada sisi permintaan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah: (1) meningkatnya permintaan pangan untuk biofuel; (2) meningkatnya konsumsi pangan akibat kenaikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu. Selain itu ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi seperti: (1) kebijakan perdagangan di negara-negara tertentu yang membatasi ekspor pangan guna melindungi keamanan pangan domestik namun justru meningkatkan ketidakamanan pangan global; dan (2) ulah para spekulan pasar keuangan yang menjadi memperburuk kenaikan harga karena menjadikannya sebagai objek spekulasi. ("The High Food Price and Food Security: Threats and Opportunity," 2008, p. 9)

Banyak yang memperkirakan bahwa volatilitas kenaikan harga komoditas pangan ini akan berlangsung singkat dan dengan cepat keseimbangan pasar akan kembali menstabilkan harga meskipun lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya. Namun pada pertengahan tahun 2010 harga kembali naik dengan cepat. Hal ini menimbulkan sebuah kesimpulan baru bahwa naik turunnya harga atau volatilitas akan menjadi karakter harga pangan ke depan ("How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies and Food Security?," 2011, p. 12).

Meskipun volatilitas dan tingginya harga pangan akan memiliki dampak positif dan negatif, namun dapat dipastikan bahwa harga pangan yang terlalu tinggi akan memukul keamanan pangan konsumen pada level rumah tangga dan individu. Laporan FAO menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan dunia akan menurunkan pendapatan riil masyarakat yang pada gilirannya akan

menurunkan asupan makanan pokok serta belanja terhadap untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian ia akan memperburuk tingkat kekurangan gizi serta tingkat kemiskinan.



Laporan FAO (2008) memperlihatkan bahwa kawasan Asia dan Pasifik merupakan kawasan yang paling terkena dampak dari tingginya harga pangan. Penyebabnya adalah tingginya jumlah penduduk dan lambannya kemajuan di dalam pengurangan kelaparan membuat kawasan ini merupakan lokasi di mana 2/3 dari jumlah penduduk dunia yang kekurangan pangan berada. India dan Cina merupakan sumber dari tingginya angka kekurangan gizi di kawasan ini dimana mereka berdua berkontribusi terhadap 41% dari angka kekurangan gizi di negara-negara berkembang. Meskipun pada sub-kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam dan Thailand, dinilai cukup berhasil di dalam mencapai target pengurangan angka kelaparan MDG's dan World Food Summit.

Kerangka Keamanan Pangan Regional Melalui ASEAN: ASEAN Integrated Food Security (AIFS)

Kenaikan harga pangan pada tahun 2007/2008 telah mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pangan mereka. Sebagai catatan bahwa kerja sama ASEAN untuk bidang pertanian telah ada sejak tahun 1968 dengan fokus pada persoalan produksi dan pasokan pangan. Pada tahun 1977 kerja sama ini diperluas mencakup bidang pertanian dan kehutanan. Idealnya kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional ASEAN di bidang keamanan pangan, pertanian, dan kehutanan serta meningkatkan kekompakan ASEAN secara internasional pada bidang-bidang tersebut.

Pada tahun 1992 ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) menetapkan tujuh prioritas kerja sama ini, yaitu ("AMAF," 2008): (1)keamanan pangan; (2)perdagangan intra dan ekstra ASEAN; (3)transfer teknologi; (4)pembangunan desa; (5)investasi; (6)sustainable development; dan (7)berbagai isu regional maupun internasional.

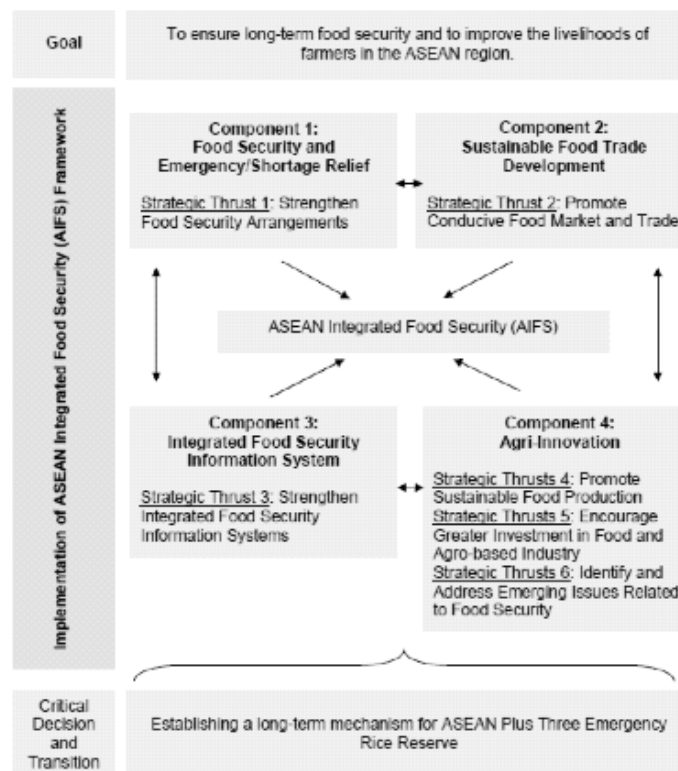
Konsep ASEAN mengenai keamanan pangan secara terintegrasi baru dimunculkan pada pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) tahun 2008 di Chiang Mai. Konsep ini kemudian disebut sebagai ASEAN Integrated Food Security (AIFS) yang akan dijabarkan oleh Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS). Tujuan dari SPA-FS adalah untuk memastikan keamanan pangan jangka panjang dan memperbaiki kehidupan petani di kawasan ASEAN .

Sasaran dari SPA-FS yang ingin dicapai dari adanya SPA-FS ini adalah: (1)peningkatan produksi pangan; (2)mengurangi gagal panen; (3)mempromosikan perdagangan; (4)stabilitas pangan; (5) ketersediaan input pertanian; (6)mengatur bantuan darurat pangan regional. Ada lima komoditas pangan strategis yang menjadi prioritas perhatian dari SPA-FS yaitu: beras, jagung, kedelai, gula,

dan singkong.

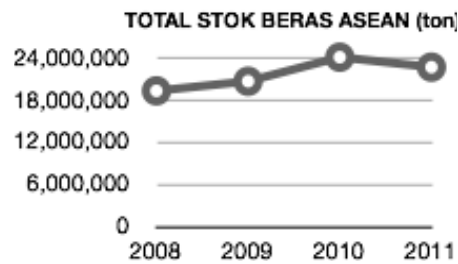
Untuk mencapai hasil tersebut maka kerangka kerja dari AIFS akan dilaksanakan di dalam empat komponen, yaitu: (1)keamanan pangan dan bantuan darurat pangan; (2)pengembangan perdagangan pangan yang berkelanjutan; (3)sistem informasi keamanan pangan yang terintegrasi; dan (4)inovasi pertanian. Implementasi dari SPA-FS akan berlangsung selama lima tahun yaitu 2009 sampai dengan 2013.

CONCEPTUAL DIAGRAM OF THE ASEAN INTEGRATED FOOD SECURITY (AIFS) FRAMEWORK IMPLEMENTATION



Bila dilihat secara keseluruhan ketersediaan pangan untuk kawasan Asia Tenggara memang relatif baik. Sebagai contoh misalnya cadangan beras sebagai makanan pokok untuk kawasan ini relatif stabil pada kisaran 22 juta ton meskipun terjadi faktor cuaca seperti banjir, namun penurunannya tidak sampai mengganggu cadangan beras ASEAN secara drastis. Rasio cadangan terhadap penggunaan domestik di negara-negara ASEAN juga berada pada kisaran aman 20%, kecuali Indonesia yang hanya 5%.

Produksi beras negara-negara di kawasan ini juga menunjukkan adanya peningkatan. Meskipun Thailand sebagai suplier beras ASEAN terbesar terkena dampak dari bencana banjir, namun produksi secara total relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dengan angka rasio produksi beras terhadap penggunaan domestik berada pada angka kisaran 112%, yang bermakna bahwa produksi beras ASEAN secara keseluruhan cukup untuk menutupi konsumsi regional. Namun patut dicermati bahwa hanya tiga negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja, yang baru dapat mencapai surplus produksi beras sehingga dapat melakukan ekspor. Sementara negara sisanya, termasuk Indonesia, merupakan net importir beras. ("ASEAN Agricultural Commodity Outlook," 2012, p. 1).



Ketersediaan dan penggunaan lahan untuk pertanian padi juga cenderung menunjukkan trend peningkatan, meskipun fluktuatif. Hal ini memperlihatkan hasrat para petani untuk bertanam padi di kawasan ini masih belum luntur. Meskipun terjadi proses transformasi industrialisasi, namun luas lahan pertanian padi masih dalam batas yang relatif aman untuk mengamankan konsumsi kawasan.

Kondisi yang hampir sama juga berlaku untuk komoditas prioritas pangan ASEAN lainnya. Produksi jagung misalnya meskipun turun ke angka 36,5 juta ton, namun masih membukukan angka cadangan hingga 5 juta ton. Sedangkan untuk produksi gula naik hingga ke angka 16,4 juta ton, sehingga menaikkan angka cadangan ke angka 3,3 juta ton. Produksi kedelai turun hingga angka 1,6 juta ton, sedangkan angka stok kedelai akan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,24 juta ton. Untuk singkong, produksi naik ke angka 66,4 juta ton, dengan stok 2,3 juta ton. Secara umum meskipun bersifat fluktuatif, namun keseluruhan tanaman pangan prioritas ASEAN masih mampu membukukan cadangan kawasan ("ASEAN Agricultural Commodity Outlook," 2012).

Dalam kaitannya keamanan pangan dengan pengentasan kekurangan gizi, bila mengacu kepada target World Food Summit untuk mengurangi jumlah penduduk yang kurang gizi hingga 50% dari tahun 1990-92, maka menurut FAO kemajuan yang telah dibuat ASEAN dinilai belum memadai. Total penduduk ASEAN berjumlah 564 juta pada tahun 2006-08. Dari angka ini masih ada 77,4 juta penduduk kekurangan gizi, hanya turun 26,9% dari angka 105,8 juta sejak tahun 1990-92.

Namun bila mengacu kepada target MDG's untuk mengurangi proporsi angka kurang gizi hingga 50% dari tahun 1990-92, kawasan ASEAN dinilai FAO akan mampu mencapai target tersebut. Dari 24% proporsi penduduk kekurangan gizi pada tahun 1990-92, maka di tahun 2006-08 ASEAN dinilai telah mengurangi proporsi tersebut hingga ke angka 14% atau berkurang sebesar 41%.



Dari seluruh negara ASEAN hanya Vietnam, Thailand, dan Filipina yang dinilai telah mampu mencapai target pengurangan proporsi kurang gizi sesuai target MDG's. Bahkan Vietnam telah mampu pula melampaui target yang disepakati di dalam World Food Summit. Adapun untuk Indonesia adalah negara yang mendapat penilaian paling buruk sekawasan ASEAN untuk pencapaian target World Food Summit maupun MDG's. ("How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies and Food Security?," 2011)

Keamanan Pangan Versus Kedaulatan Pangan

Apakah sebenarnya keamanan pangan itu? Konsep mengenai keamanan pangan telah mengalami evolusi yang cukup panjang secara definisi. Pada masa 1960-an hingga 1970-an pemahaman konsep ini lebih kepada persoalan pasokan pangan (food supply). Pada tahun 1974 di

dalam resolusi mengenai Internasional Undertaking on Wood Food Security (IUWFS) yang didukung oleh FAO dan The World Food Conference, keamanan pangan didefinisikan sebagai “ketersediaan pasokan makanan pokok yang memadai sepanjang waktu untuk menghindari kelangkaan pangan pada masa gagal panen atau bencana alam yang meluas, keberlanjutan peningkatan produksi dan konsumsi, serta mengurangi fluktuasi produksi dan harga” (Shaw, 2007, p. 150). Untuk itu IUWFS juga mendefinisikan level aman minimal untuk stok pangan sebagai “jumlah total cadangan sebelumnya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pasokan musim berikutnya pada pasar nasional dan internasional, dan untuk menjaga level konsumsi dan perlindungan terhadap kelangkaan yang parah pada masa kegagalan panen atau bencana alam”.

Konsep awal ini masih berfokus kepada persoalan peningkatan produksi, terutama di negara berkembang, menstabilkan pasokan pangan, memanfaatkan surplus pangan di negara maju, menciptakan cadangan pangan dunia dan nasional, menstimulasi perdagangan pertanian dunia, menegosiasikan kesepakatan mengenai komoditas internasional, dan meningkatkan kesepahaman mengenai kampanye Freedom From Hunger. Negara-negara berkembang kemudian berhasil mencapai target tersebut melalui Green Revolution dengan menggunakan bibit, pupuk, dan irigasi yang telah dikembangkan untuk menghasilkan lebih banyak pangan. Namun menjelang akhir 1970-an dan awal 1980-an pertumbuhan ini ternyata tidak terlihat memberikan manfaat bagi setiap orang, dan yang pasti tidak menghapuskan kelaparan dan kekurangan gizi.

Pendekatan dari sisi pasokan (*supply driven*) ini kemudian mulai banyak menuai kritik. Salah satu kritik yang paling terkenal adalah dari Amartya Sen yang mengatakan bahwa produksi pangan saja tidaklah cukup, orang membutuhkan akses kepada pangan, untuk mendapatkan ‘*entitlement*’ atau hak kepemilikan terhadap pangan tersebut. Menurutinya walaupun tidak ada kelangkaan pangan orang bisa saja mengalami ketidakamanan pangan. (“Sustainable Agriculture and Food Security in Asia Pacific,” 2009, p. 20)

Setelah krisis krisis pangan evolusi keamanan pangan paling tidak telah mengalami tiga jenis pergeseran: (1) dari global dan nasional bergeser kepada rumah tangga dan individu; (2) dari ‘food first’ kepada perpektif kehidupan; (3) dari indikator objektif kepada persepsi subjektif (Maxwell, 2001). Selanjutnya fase dari perkembangan konsep dan kebijakan keamanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut: (1) pada masa krisis pangan dan World Food Conference 1974 sasarannya adalah membentuk sistem keamanan pangan global; (2) pada paruh awal 1980-an konsep Amartya Sen’s mengenai ‘entitlement’ serta dampak kontraproduktif dari proram *Structural Adjustment* IMF dan World Bank; (3) pada paruh kedua era 1980-an ketika terjadi bencana kelaparan di Afrika, ketahanan pangan lebih ditekankan kepada persoalan kelaparan dan sebab-sebabnya; (4) dan pada era 1990-an ketika ketahanan pangan dikaitkan dengan kelaparan dan kekurangan gizi (Shaw, 2007, p. 385).

Perkembangan terkini definisi kewanaman pangan adalah sebagai mana yang disampaikan oleh Food and Agriculture Organization, yaitu “keamanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang, pada setiap waktu, memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi, terhadap pangan secara cukup, aman, dan sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan pilihan pangan mereka bagi kehidupan yang aktif dan sehat”. Sedangkan ketidakamanan atau kerawanan pangan (Food Insecurity) adalah “sebuah kondisi dimana orang tidak memiliki akses terhadap pangan yang memadai secara fisik, sosial, dan ekonomi” (“The Economic Crises - Impacts and Lesson Learned,” 2008, p. 8)

Sebagai tambahan, kekurangan gizi (*undernourishment*) adalah “sebuah kondisi ketika asupan kalori berada di bawah persyaratan minimum energi makanan (*Minimum Dietary Energi Requirement*: MDER)”. MDER adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk aktifitas ringan serta berat badan minimum bagi tinggi badan tertentu. MDER berbeda-beda bagi tiap negara dan dari tahun ke tahun tergantung dari gender dan struktur umur dari populasi. Kata-kata kekurangan

gizi (*undernourishment*) dan kelaparan (*hunger*) sering digunakan secara bergantian ("The Economic Crises - Impacts and Lesson Learned," 2008, p. 8).

Lalu, apakah kini masalah keamanan pangan dunia telah dapat diselesaikan? Faktanya hingga tahun 2010, 925 juta orang di dunia tidak memiliki akses yang memadai kepada pangan dan 98% dari mereka hidup di negara berkembang, 60% dari kasus kelaparan tersebut menimpa kaum wanita, 10,9 juta anak di bawah 5 tahun mati setiap tahun dan kebanyakan dari penyebab kematian mereka adalah kekurangan pangan ("UN World Food Program Statistic," 2010). Fakta yang mencengangkan ini tampaknya menjadikan konsep keamanan pangan mulai bergeser kembali.

Muncul dari sebuah gerakan internasional yang bernama La Via Campesina, pada tahun 1996 gagasan mengenai Kedaulatan Pangan atau *Food Sovereignty* diperkenalkan secara resmi di dalam pertemuan World Food Summit. La Via Campesina, menurut web resmi mereka, merupakan perwakilan dari kelompok petani yang berasal Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, didirikan pada tahun 1993 di Mons Belgia. Pendirian organisasi berangkat dari sikap kritis mereka terhadap masalah globalisasi kebijakan pertanian dan agribisnis. Menurut mereka dalam konteks ini suara petani kecil harus didengar. Petani kecil dan menengah harus terlibat langsung dalam penentuan berbagai kebijakan yang akan menentukan nasib mereka. Kini organisasi ini beranggotakan sekitar 200 juta petani dan 150 organisasi yang berasal dari 70 negara yang menjadikan mereka aktor utama dalam perdebatan mengenai persoalan pertanian. Suara mereka didengar oleh institusi-institusi seperti FAO dan UN Human Rights Council.

Konsep kedaulatan pangan yang disampaikan oleh La Via Campesina adalah "hak dari masyarakat untuk memperoleh pangan yang sehat dan sesuai budayanya, yang diproduksi melalui metode berkelanjutan dan hak mereka untuk menentukan pangan serta sistem pertanian mereka sendiri". Lebih tegas La Via Campesina pada tahun 1996 menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah "hak setiap negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kapasitasnya dalam memproduksi pangan pokoknya sesuai dengan budaya dan perbedaan cara produksi. Kita memiliki hak untuk memproduksi makanan kita sendiri di dalam wilayah kita sendiri. Kedaulatan pangan adalah prasyarat untuk terciptanya keamanan pangan".

Hal ini meletakkan aspirasi, kebutuhan, dan kelangsungan hidup mereka yang memproduksi, mendistribusikan, serta mengkonsumsi pangan sebagai jantung dari sistem dan kebijakan pangan, bukannya pada pasar dan korporasi. Kedaulatan pangan memprioritaskan kepada produksi dan konsumsi pangan lokal. Hal ini memastikan perlindungan para produser lokal dari impor murah dan kontrol produksi. Kebijakan tersebut juga memastikan hak untuk menggunakan dan mengelola tanah, air, bibit, ternak, dan biodiversitas di tangan mereka yang memproduksinya dan bukan di tangan perusahaan ("La Via Campesina,"). Ada tujuh prinsip dari konsep kedaulatan pangan menurut La Via Campesina (Michael Windfuhr, 2004, p. 15).

1. Pangan sebagai hak asasi manusia dimana setiap orang harus memiliki akses kepada pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk keberlangsungan hidup yang sehat sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
2. Reformasi agraria untuk memberikan hak milik dan kontrol atas tanah bagi para petani yang selama ini tidak memiliki tanah, serta mengembalikan kembali wilayah kepada penduduk asli.
3. Perlindungan terhadap kekayaan alam, dimana masyarakat harus diberikan hak untuk pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber daya alam dan pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.
4. Mengorganisasikan kembali perdagangan pangan, dimana kebijakan pertanian nasional harus memprioritas produksi untuk konsumsi domestik dan swasembada pangan. Impor pangan tidak boleh menggantikan produksi lokal atau menekan harga. Untuk itu praktek dumping atau subsidi ekspor tidak boleh dilakukan. Harga pangan domestik maupun internasional haruslah

diregulasi dan merefleksikan biaya produksi pangan yang sesungguhnya. Hal ini untuk memastikan bahwa keluarga petani akan mendapatkan pemasukan yang layak.

5. Mengakhiri kelaparan global. Kedaulatan pangan selama ini telah dilemahkan oleh institusi multilateral dan spekulasi kapital. Perusahaan-perusahaan multinasional dan para spekulasi kapital yang mengendalikan kebijakan pertanian telah difasilitasi World Bank, IMF, dan WTO. Dibutuhkan regulasi dan pajak untuk mengendalikan spekulasi kapital dan MNC.
6. Perdamaian sosial. Pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata. Marginalisasi pedesaan, etnis, dan penduduk asli, pengusiran, keterpaksaan urbanisasi, dan represi terhadap para petani tidak boleh terjadi.
7. Kontrol demokrasi, dimana para petani harus mendapatkan akses langsung untuk memformulasikan kebijakan pertanian pada semua level.

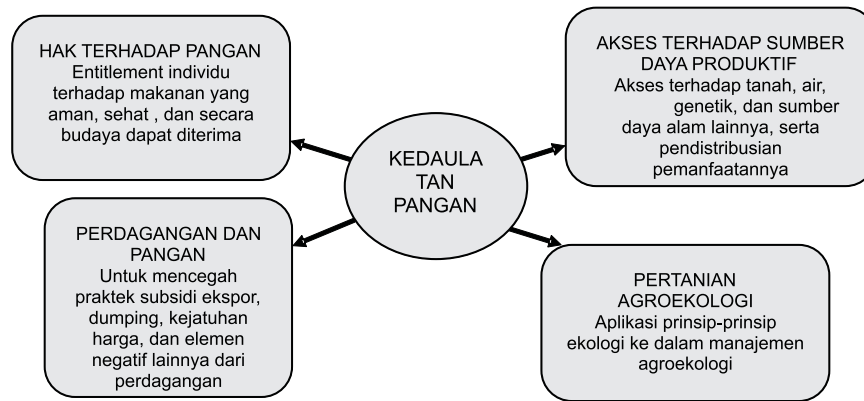
Konsep kedaulatan pangan dapat dibedakan dan sangat kontras dengan model neoliberalisme mengenai ketahanan pangan. Kedaulatan pangan memfokuskan kepada produksi lokal bagi konsumsi lokal dan dilandasi oleh gagasan mengenai saling ketergantungan. Hal ini sangat berbeda dengan visi globalisasi ala neoliberal yang menekankan kepada dunia yang terintegrasi dan terdiri dari individu-individu yang bersifat rasional, otonom, dan self-interest. Untuk itu konsep ekonomi murni mengenai kompetisi, efisiensi, profit, dan konsumsi yang tanpa batas dapat dibandingkan dengan konsep mengenai kerja sama, produksi yang efisien bagi komunitas lokal, saling mensejahterakan, dan pembangunan yang berkelanjutan (Schanbacher, 2010, p. 55).

Menurut Schanbacher kritik terhadap reformasi pertanian dengan model pasar, yaitu liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi telah berdampak terhadap spesialisasi dan homogenisasi pertanian lokal. Pertanian skala kecil ditransformasi kepada model pertanian besar yang mempraktekkan monocropping, padat modal, dan merusak keanekaragaman hayati. Para aktivis kedaulatan pangan sangat meyakini bahwa pertanian dalam skala kecil akan sangat bermanfaat tidak hanya dalam perolehan ekonomi, namun juga kepada pelestarian keanekaragaman hayati, menghubungkan petani dengan tanah, dan juga menciptakan kedekatan hubungan antara petani, tanaman, dan makanan yang mereka produksi dan mereka konsumsi.

Selain itu pertanian pada skala kecil ini juga mengadopsi apa yang disebut sebagai agroekologi. Agroekologi adalah sistem pertanian yang berbasis kepada pengetahuan lokal dan tradisional, yang aman terhadap lingkungan, dan secara budaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menggunakan input organik ketimbang kimiawi, dan keanekaragaman hayati.

Kedaulatan pangan juga berusaha melindungi para petani kecil dari monopoli bibit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, seperti Monsanto, Dupont, dan Syngenta. Ketiga perusahaan ini saja menguasai lebih kurang 47% pasokan bibit dunia (10 perusahaan bibit dunia menguasai lebih kurang 67% pasaran bibit dunia). Dampak dari praktek monopoli ini adalah hilangnya keanekaragaman hayati dari bibit-bibit yang selama ini telah ada, ketergantungan para petani terhadap produk bibit korporasi dan produk-produk tambahan lainnya, serta efek samping dari penggunaan bibit transgenik terhadap lingkungan maupun manusia sendiri (Schanbacher, 2010, p. 59).

Pada tahun 2002 beberapa organisasi non pemerintah dan pergerakan sosial yang tergabung dalam *International Planning Committee for Food Sovereignty* (IPC) menyampaikan bahwa kedaulatan pangan mencakup empat area prioritas atau pilar, yaitu (Lee, 2007): (1) hak terhadap pangan; (2) akses kepada sumber daya produktif; (3) mengarusutamakan produksi yang bersifat agroekologi; dan (4) perdagangan serta pasar lokal.



Secara politis konsep kedaulatan pangan memiliki beberapa kelebihan (Hospes, 2010). Pertama konsep ini menyoroti akar penyebab marginalisasi petani kecil. Ia menaruh perhatian kepada kemungkinan keterkaitan antara globalisasi produksi pangan dan perdagangan dengan kemiskinan pedesaan dan lemahnya pembangunan sektor pertanian. Kedua, konsep keamanan pangan juga menyoroti marginalisasi politik. Ia menitikberatkan bahwa para petani kecil miskin pedesaan juga harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan yang menyangkut persoalan pertanian, termasuk dalam negosiasi perdagangan pertanian. Ketiga, konsep ini membangun pendekatan yang bersifat multi-level untuk menghadapi marginalisasi ekonomi dan politik petani kecil tersebut. Ia tidak hanya berbicara mengenai reformasi di dalam lembaga-lembanga multinasional seperti WTO, namun juga dukungan terhadap sistem pertanian lokal dan bagaimana pemerintah nasional dapat menyusun sebuah kebijakan pertanian dan kebijakan pangan yang berdasarkan hak asasi manusia.

Namun sebagaimana lazimnya terjadi di dalam perkembangan dialektika mengenai suatu konsep, kedaulatan pangan pun tidak dapat dilepaskan dari kritik. Menurut Hospes beberapa kritik terhadap konsep ini adalah (Hospes, 2010): pertama, masih belum jelas dampak dan keuntungan dari pengimplementasian kedaulatan pangan sebagai sebuah kebijakan. Misalnya faktor resiko terhadap keamanan pangan secara nasional dan global yang dihadapi ketika mengandalkan sepenuhnya kepada produksi petani kecil. Kedua, konsep kedaulatan pangan kurang memberikan perhatian terhadap konflik kepentingan yang akan terjadi antara individu, komunitas, dan pemerintah nasional dalam pengimplementasian konsep kedaulatan pangan. Dalam hal ini siapa yang berhak menentukan kebijakan pertanian dan pangan, sebab kedaulatan pangan juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekuasaan, legitimasi, dan representasi. Ketiga, pergerakan kedaulatan pangan beresiko menjauhkan dirinya pembuatan kebijakan pada level internasional bila ia tidak memperhatikan potensi keuntungan yang didapat dari liberalisasi perdagangan dan bila ia mengusulkan untuk mengeluarkan pertanian dari perundingan WTO.

Kedaulatan Pangan Indonesia: Mau Kemana?

Berikut ini adalah fakta mengenai posisi pasokan pangan Indonesia dalam kaitannya dengan komoditas pangan strategis ASEAN ("ASEAN Agricultural Commodity Outlook," 2012):

1. Pengimpor beras no. 1 di ASEAN pada tahun 2011 (1.620.000 ton)

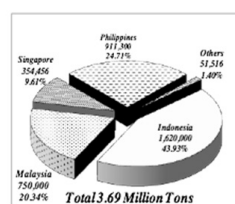


Figure 9 Share of rice import (tons) among ASEAN countries, 2011

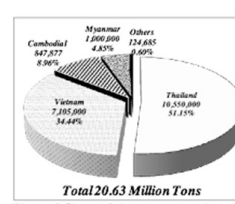


Figure 6 Share of rice export (tons) among ASEAN countries, 2011

2. Pengimpor gula no. 1 di ASEAN pada tahun 2011 (1.689.000 ton)

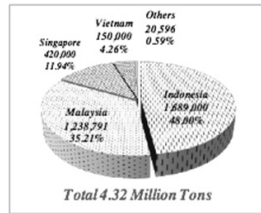


Figure 40 Share of sugar import (tons) among ASEAN countries, 2011

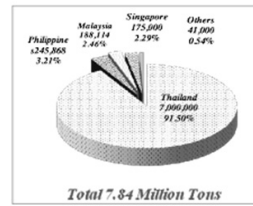


Figure 37 Share of sugar export (tons) among ASEAN countries, 2011

3. Pengimpor jagung no. 1 di ASEAN pada tahun 2011 (2.682.000 ton)

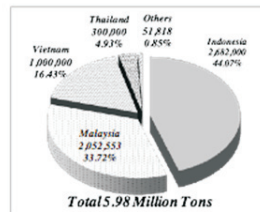


Figure 25 Share of maize import (tons) Among ASEAN countries, 2011

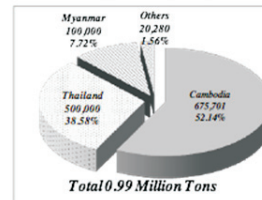


Figure 22 Share of maize export (ton) among ASEAN countries, 2011

4. Pengimpor kedelai no.3 di ASEAN pada tahun 2011 (1.440.659 ton)

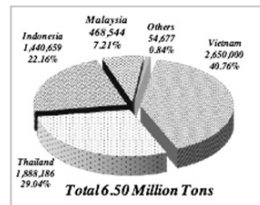


Figure 54 Share of soybean import (ton) among ASEAN countries, 2011

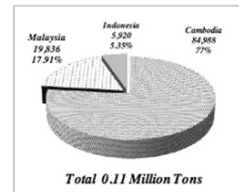


Figure 51 Share of soybean export (ton) among ASEAN countries, 2011

5. Meskipun bukan termasuk pengimpor casava dalam jumlah besar, namun Indonesia juga bukan negara pengeksport casava.

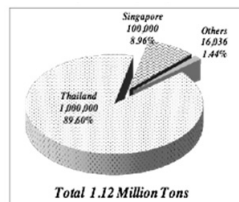


Figure 68 Share of cassava import (tons) among ASEAN countries, 2011

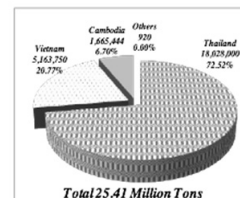
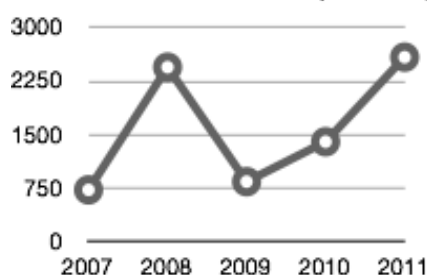


Figure 65 Share of cassava export (tons) among ASEAN countries, 2011

Fakta-fakta ini meskipun tidak mengejutkan, namun membuat kita berfikir mengenai ketergantungan pangan nasional Indonesia. Tidak hanya terhadap produk pangan, ketergantungan ini pun termasuk terhadap input utama pertanian seperti pupuk dan bibit. Untuk kondisi pupuk nasional, nilai impor pupuk memperlihatkan kecenderungan untuk terus meningkat. Data Kementerian Perdagangan untuk impor pupuk pada tahun 2011 mencapai angka US\$ 2.587.000 (2011).

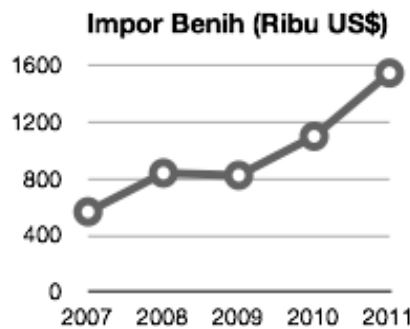
IK IMPOR PUPUK INDONESIA (2007-2011)



Produksi pupuk nasional memang belum mampu menutup kebutuhan pertanian domestik. Menurut prediksi Kementerian Perindustrian, kebutuhan pupuk anorganik nasional di tahun 2011 adalah sebanyak 9,3 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk super phosphate (SP-36), 1,6 juta ton pupuk ZA, dan 8,8 juta ton pupuk NPK. Sementara proyeksi produksi nasional pada tahun yang sama adalah pupuk urea sebanyak 8,05 juta ton, pupuk SP-36 sebanyak 1,0 juta ton, pupuk ZA 0,65 juta ton, dan pupuk NPK sebanyak 5,89 juta ton. Untuk kebutuhan pupuk organik di Indonesia pada tahun 2011 adalah 12,394 juta ton. Padahal pabrik pupuk BUMN pada tahun yang sama hanya memproduksi pupuk organik sebanyak 2,601 juta ton. Ada potensi kekurangan pupuk organik sebanyak 9,793 juta ton ("Pengembangan Pupuk Organik Mendukung Pasokan Pupuk Nasional 2011," 2011).

Kondisi ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Sebagian besar dari produsen pupuk nasional adalah Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari industri pupuk memang untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan nasional. Salah satu kendala utama dari industri pupuk adalah pasokan gas. Mengingat prioritas pemerintah pada sektor energi adalah kepada penerimaan devisa, maka gas sebagai produk energi terikat kontrak ekspor jangka panjang. Dengan demikian industri pupuk harus membeli pasokan gas sesuai dengan harga pasar. Padahal mereka hanya boleh menjual pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini belum ditambah lagi dengan pasokan gas yang seringkali tersendat. Kita tentu masih ingat kondisi PT ASEAN Aceh Fertilizer (perusahaan patungan beberapa negara anggota ASEAN) yang bangkrut, ironis padahal ia berada tidak jauh dari ladang-ladang gas terbesar di Aceh ("Perkembangan Industri Pupuk di Indonesia," 2008).

Dalam kaitannya dengan bibit kondisinya tidak jauh berbeda. Menurut Kementerian Perdagangan trend impor benih juga memperlihatkan kecenderungan terus naik. Persoalan benih ini kemudian bertambah runyam karena ia melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk memelihara kepentingan mereka. Apalagi kepentingan mereka tersebut kemudian dilindungi oleh Undang-Undang no. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Undang-undang ini dianggap sebagai biang keladi kriminalisasi petani di dalam menghadapi korporasi besar dan pemerintah.



Sejak tahun 2004 di Jawa Timur misalnya tidak kurang 17 petani dan pedagang benih jagung lokal di Jawa Timur mengalami kriminalisasi oleh perusahaan benih internasional. Pada kasus-kasus tersebut bila ditelusuri maka akan bermuara kepada Monsanto, yaitu perusahaan pertanian multinasional raksasa yang sangat terkenal dengan praktek-praktek serupa di berbagai negara. Kasus-kasus lain yang juga melibatkan Monsanto misalnya kegagalan panen petani padi Rembang tahun 2012 setelah menggunakan produk PT BISI Internasional tbk ("Petani Rembang Tuntut Ganti Rugi Perusahaan Benih," 2012). PT BISI tbk Internasional adalah anak perusahaan Charoen Pokhpan perusahaan yang menjadi mitra dagang dan pemegang ijin utama perusahaan benih Dekalb Genetics (AS) yang dibeli oleh Monsanto pada tahun 1998 seharga 2,3 milyar dolar ("Pledoi Melawan Kriminalisasi Petani: Menegaskan Negara Res-Publica, Menolak Negara Res-Privata,"

2010). Perusahaan inilah yang juga berulang kali menuntut petani karena tuduhan pelanggaran hukum atas kasus benih.

Kasus lain Monsanto yang sangat mengejutkan terjadi pada tahun 2005 di Sulawesi Selatan ketika terjadi kegagalan panen para petani kapas akibat menggunakan benih transgenik ilegal dari Monsanto. Kasus ini menjadi besar karena mengindikasikan adanya penyusupan hingga di tingkat pejabat tinggi negara dan menimbulkan tuntutan hukum terhadap Monsanto di Amerika Serikat. Uniknya kasus ini hingga kini belum kunjung terselesaikan oleh KPK. Namun jangan dikira bahwa persoalan benih di negeri ini telah usai. Berita di harian Kompas 19 September 2012 mengenai rekomendasi oleh Komisi Keamanan Hayati terhadap jagung hasil rekayasa genetik produk Monsanto yang kontroversial menyadarkan kita bahwa perang penguasaan korporasi asing terhadap pertanian Indonesia belumlah usai ("Konsekuensi Jagung Transgenik," 2012).

Tambahkan persoalan-persoalan pertanian ini dengan konflik agraria maka hampir sempurna penderitaan petani Indonesia. Serikat Petani Indonesia memaparkan bahwa penyempitan lahan pertanian, konflik agraria, kekerasan, dan kriminalisasi petani semakin marak sepanjang tahun 2011. Petani terus dihadapkan dengan penangkapan, penggusuran, penembakan, serta berbagai tindakan kekerasan sepanjang tahun ini. Hal ini berdampak nyata terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya lagi terhadap perempuan ("Tahun Korporasi Besar dan Penggusuran Pertanian Rakyat", 2011). Berikut catatan perkembangan kasus agraria yang disampaikan oleh Serikat Petani Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Kasus Agraria 2009 - 2011²

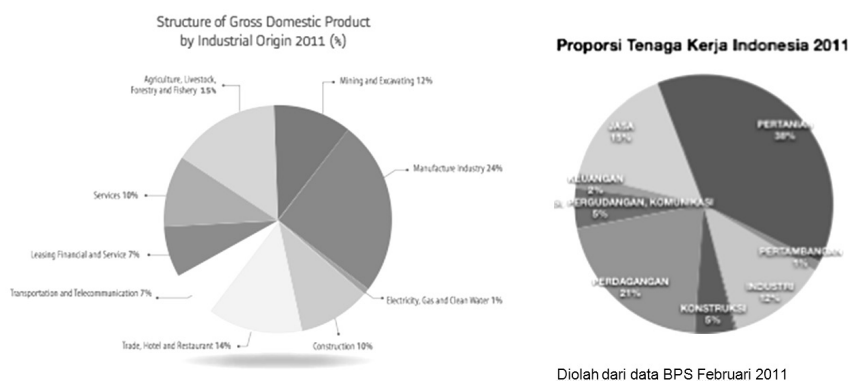
Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011	120	342.360, 43	35 orang	273.888 KK	18 orang

Inilah sebagian karut marut wajah pertanian Indonesia. Pasca reformasi ala neoliberal ditahun 1998 yang dibawa oleh para agen Washington Consensus, privatisasi pertanian dan marginalisasi petani kecil serta perusakan ekosistem lingkungan seolah menjadi kabar buruk yang tak kunjung usai. Prestasi awal neoliberalisme adalah importasi beras dan pelucutan peran Bulog. Sangat mengherankan memang melihat antusiasme para pendukung kebijakan pasar bebas ini. Bahkan Karl Polanyi sejak tahun 1944 telah menggambarkan kemunculan pasar bebas ini sebagai sebuah ideologi utopia yang berdasarkan semata-mata kepada premis bahwa pasar yang tidak diatur (unregulated) atau pasar bebas akan membawa kesejahteraan bagi semua orang. Namun menurutnya ideologi ini memiliki sejumlah cacat yang mendasar. Kebijakan neoliberal akan membawa semua produk kepada pasar bebas dunia dan akan mengintensifkan kompetisi dalam kontrol sumber daya alam dan tanah (Collins, 2007, p. 189).

Pasar yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar dan tiadanya peran pemerintah, atau pemerintah yang justru bersekutu dengan korporasi, akan membawa kepada konflik dan eksploitasi terhadap mereka yang berada pada anak tangga ketidakberdayaan paling bawah. Namun sikap keras kepala para utopian pasar bebas di Indonesia tampaknya memang sejak awal sudah begitu meyakini kebaikan pasar bebas, dalam hal ini bagi produk pertanian. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Marie Pangestu dan teman-teman pada tahun 2002 mengenai kemungkinan kebaikan pasar bebas, dengan menggunakan model komputasi, dalam konteks AFTA dan APEC bagi pertanian Indonesia. Menurut mereka semakin besar partisipasi negara, semakin luas sektor yang dicakup, semakin besar pengurangan tarif, maka akan semakin besar manfaat kesejahteraan yang diperoleh dari perdagangan bebas. Untuk Indonesia dampak keterlibatan Indonesia dalam AFTA akan besar,

dimana Indonesia akan mendapatkan akses-akses ke negara-negara ASEAN lainnya (Mari Pangestu, 2002, p. 35). Ironis bila penelitian itu dibandingkan dengan realita yang terjadi 10 tahun kemudian. Sejak dibukanya gerbang impor, petani dari berbagai komoditas berteriak mengeluhkan kejatuhan harga akibat serbuan produk impor. Logika ekonominya bila hal ini dibiarkan terus terjadi adalah petani akan kehilangan insentif untuk bercocok tanam dan berpindah ke sektor-sektor lain yang menjanjikan pendapatan dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Pemerintah dalam hal ini seolah lupa bahwa keberlangsungan hidup bangsa ini ditopang justru oleh para petani kecil yang masih sangat tergantung alam tersebut. Sektor pertanian merupakan tempat menggantungkan hidup lebih dari 42,47 juta jiwa penduduk Indonesia dan ini sama dengan lebih kurang 40% dari jumlah penduduk (terbesar). Sektor pertanian menyumbang lebih kurang 15,7% Produk Domestik Bruto dengan laju pertumbuhan 3,4%. Namun dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 6,5%, sektor pertanian hanya menyumbang 0,4%.



Tingginya angka penduduk yang bekerja di sektor pertanian identik dengan kemiskinan (dalam kasus Indonesia). Laporan Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2011 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 30,02 juta, dengan komposisi penduduk miskin pedesaan 18,97 juta dan 11,05 juta penduduk miskin perkotaan. Ketika tingkat kemiskinan pedesaan disetarakan dengan jumlah petani gurem yang hanya punya tanah garapan kurang dari 0,5 ha, menurut sensus pertanian Indonesia tahun 2008 jumlahnya adalah 15,6 juta kepala keluarga (bandingkan dengan sensus tahun 2003 yang berjumlah 13,7 juta jiwa). Dengan melihat data ini saja sebenarnya solusi ketahanan pangan dan kemiskinan sudah tampak jelas terlihat, yaitu fokuslah kepada pertanian dan pedesaan. Masalah kemiskinan perkotaan akibat urbanisasi pun dengan ini akan turut terpecahkan. Dengan mengabaikannya, wajarlah kalau MDG's dan target keamanan pangan Indonesia paling melorot di Asia Tenggara.

Namun fakta justru memperlihatkan bahwa meskipun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian relatif signifikan namun kecenderungan jumlah petani miskin malah makin bertambah. Artinya petani memiliki keterbatasan-keterbatasan secara struktural yang membuat peningkatan produktifitas pertanian belum tentu akan memberikan dampak peningkatan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ketidaklayakan hidup sebagai seorang petani ini pulalah yang menjadikan minat pilihan hidup anak petani untuk melanjutkan usaha tani orang tuanya menjadi kecil. Hasil penelitian penelitian Perhimpunan Sarjana Pertanian menunjukkan bahwa ketersediaan petani di lumbung-lumbung pertanian didominasi oleh struktur usia di atas 45 tahun. Krisis petani muda (2011) terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ("Tahun Korporasi Besar dan Penggusuran Pertanian Rakyat", 2011).

Dapatkah kita membayangkan apa artinya itu bagi keamanan pangan Indonesia? Dan mari kemudian kita mengutip apa yang dikatakan oleh mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada pertemuan UN World Food Day 2008 mengenai krisis harga pangan dan kritiknya terhadap

kebijakan keamanan pangan ala IMF, World Bank, dan Amerika Serikat (Henley, 2008),

“..kita semua telah mengacaukannya, termasuk saya sendiri, dengan memperlakukan tanaman pangan seperti TV berwarna dan bukannya sebagai komoditas vital bagi negara-negara miskin. Pangan bukanlah komoditas biasa. Kita harus kembali kepada kebijakan kemandirian pangan secara maksimal. Adalah gila bila kita berpikir bahwa kita dapat membangun suatu negara tanpa meningkatkan kemampuan mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri.”

Keamanan Pangan Regional Melalui Kedaulatan Pangan Lokal

Konsep keamanan pangan ASEAN bila secara seksama diperhatikan terlihat masih merupakan sebuah konsep konvensional yang semata-mata lebih menitikberatkan kepada pasokan pangan. Konsep keamanan pangan ASEAN bahkan bukan merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang mengacu kepada konsep keamanan pangan FAO saat ini. Apalagi bila dikaitkan dengan konsep yang lebih holistik mengenai kedaulatan pangan.

Lebih jauh dalam perkembangan kondisi pangan dunia saat ini, konsep keamanan pangan ASEAN tampaknya memang harus direvisi lagi dengan merujuk dan memasukkan konsep kedaulatan pangan. Pada kondisi diambang krisis pangan seperti sekarang, sulit membayangkan keamanan pangan tanpa kedaulatan pangan.

Meski demikian beberapa hal memang perlu diperhatikan dalam diskusi mengenai keamanan pangan dan kedaulatan pangan. Sebagaimana menurut Hospes, yaitu (Hospes, 2010): pertama, dibutuhkan pemahaman empiris dan konseptual yang lebih besar untuk memahami persoalan kedaulatan pangan pada level (individu, rumah tangga, komunitas, negara, dan global), kategori masyarakat (petani kecil, buruh yang tidak punya tanah, masyarakat miskin perkotaan), dan untuk negara (importir atau eksportir) yang berbeda. Kedua, produksi pangan pada petani skala kecil tidaklah untuk menggantikan pertanian skala besar dan berorientasi ekspor, namun mereka saling melengkapi. Ketiga, pergerakan petani dan LSM harus menemukan sekutu di dalam pemerintah nasional dan WTO untuk menciptakan ruang kebijakan dan negosiasi pada level yang berbeda. Sekiranya perlu ditambahkan di sini bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang anti perdagangan (harap dibedakan perdagangan dengan perdagangan bebas) dan anti-asing. Pembicaraan mengenai kedaulatan pangan tetap harus memasukkan prinsip-prinsip kebaikan dari interdependensi antar-negara.

Akhirnya, dengan jumlah penduduk sebesar Indonesia, kehilangan kedaulatan pangan berarti kehilangan keamanan pangan, dan dapat dibayangkan besarnya tarikan yang akan menyeret kawasan ini kepada pusaran krisis pangan bila itu terjadi. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, kerawanan pangan di Indonesia akan menyedot cadangan pangan negara-negara sekawasan. Atau kedua, negara-negara di kawasan ini akan justru memproteksi cadangan dan kepentingan mereka sendiri dan pada akhirnya akan malah membahayakan hubungan ASEAN ke depan.

Daftar Pustaka

- . (2011). Retrieved 20/9, 2012, from [http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_impor_nonmigas_\(komoditi\)/](http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_impor_nonmigas_(komoditi)/)
- . AMAF. (2008). Retrieved 20-9, 2012, from <http://www.aseansec.org/19587.htm>
- . ASEAN Agricultural Commodity Outlook. (2012) (Vol. 7). Bangkok: ASEAN Food Security Information Center.
- Collins, E. F. (2007). Indonesian Betrayed: How Development Fails. Hawaii: University of Hawaii Press.
- . The Economic Crises - Impacts and Lesson Learned. (2008) The State of Food Insecurity in the

- Wold. Rome: Food and Agriculture Organization of United Nations.
- Henley, C. J. (2008, 28/10/2008). We Blew It on Global Feed, Says Bill Clinton, San Frasier Chronicle.
- The High Food Price and Food Security: Threats and Opportunity. (2008). The State of Food Insecurity in The World 2008.
- Hospes, O. (2010). Food Sovereignty. Netherland: Wageningen UR.
- . How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies and Food Security? (2011) The State of Food Insecurity in The Wolrd 2011. Rome: FAO.
- Konsekuensi Jagung Transgenik. (2012, 19-9-2012). Kompas.
- . La Via Campesina. Retrieved 20-9, 2012, from <http://viacampesina.org/en/index.php/organisation-mainmenu-44>
- Lee, R. (2007). Food Security and Food Sovereignty. Center for Rural Economy Discussion Paper Series (University of NewCastle Upon Tyne, 11.
- Mari Pangestu, E., Tubagus Feridhanusetiyawan. (2002). Effects on AFTA and APEC Reforms on Indonesian Agriculture. In R. S. Kim Anderson, Erwidodo, Tubagus Feridhanusetiyawan (Ed.), Indonesia in A Reforming World Economy: Effects on Agriculture, Trade, and The Environment. Adelaide: The Universtiy of Adelaide Press.
- Maxwell, S. D. S. (2001). Food Security in Sub Sahara Africa. London: ITGD Publisher.
- Michael Windfuhr, J. J. (2004). Policy Paper on Food Sovereignty: Towards a New Understanding and a New Framework for Poverty Reduction and to Combating Hunger in Developing Countries. Heidelberg: Intermediate Technology Development Group.
- . Pengembangan Pupuk Organik Mendukung Pasokan Pupuk Nasional 2011. (2011). Retrieved 20/9, 2012, from <http://mediadata.co.id/MCS-Indonesia-Edition/pengembangan-pupuk-organik-mendukung-pasokan-pupuk-nasional-2011.html>
- . Perkembangan Industri Pupuk di Indonesia. (2008). Retrieved 20/9, 2012, from <http://www.datacon.co.id/Fertilizer2008Ind.html>
- Petani Rembang Tuntut Ganti Rugi Perusahaan Benih. (2012). Kompas.
- . Pledoi Melawan Kriminalisasi Petani: Menegaskan Negara Res-Publica, Menolak Negara Res-Privata. (2010). Pengadilan Negeri Kediri: Tim Kuasa Hukum Kunoto.
- Schanbacher, W. D. (2010). The Politics of Food: The Global Conflict Between Food Security and Food Souvereignty. Santa Barbara: Praeger.
- Shaw, D. J. (2007). World Food Security: A History Since 1945. New York: Palgrave Macmillan.
- . Sustainable Agriculture and Food Security in Asia Pacific. (2009). Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- . Tahun Korporasi Besar dan Penggusuran Pertanian Rakyat (2011). Jakarta: Serikat Petani Indonesia.
- . UN World Food Program Statistic. (2010): UN World Food Program.